

# PERATURAN MENTERI NO. 09 TH 2005

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER.09/MEN/V/2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN  
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuahan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2819 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce ( Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309));
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri dan diserahi tugas mengawasi serta menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
3. Laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat hasil kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik laporan individu pegawai pengawas ketenagakerjaan maupun laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat adalah unit kerja pelaksana yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Instansi di Kabupaten/Kota adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
6. Instansi di Provinsi adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
7. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Provinsi adalah unit kerja pelaksana yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau Provinsi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan..

9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **Pasal 2**

- (1). Instansi di Kabupaten/Kota mengumpulkan, mengolah, mencatat dan menyimpan serta menyajikan data pengawasan ketenagakerjaan.
- (2). Data pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ;
  - b. Objek pengawasan ketenagakerjaan ;
  - c. Objek pengawasan norma jamsostek ;
  - d. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian ;
  - e. Perijinan objek pengawasan ketenagakerjaan ;
  - f. Jenis kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ;
  - g. Jenis pelanggaran dan tindak lanjut ;
  - h. Penyidikan.

## **Pasal 3**

- (1). Pegawai pengawas ketenagakerjaan secara individual wajib membuat laporan setiap kegiatan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan setiap selesai melaksanakan tugas atau setiap tahap penyelesaian untuk kegiatan yang bersifat berkelanjutan.

## **Pasal 4**

- (1). Berdasarkan laporan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) instansi di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada instansi di Provinsi.
- (2). Instansi di Provinsi menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dari instansi di masing- masing Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3). Instansi di Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4). Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara nasional kepada Menteri.
- (5). Dalam hal unit kerja pengawasan ketenagakerjaan tidak berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab instansi di Kabupaten/Kota atau di Provinsi maka unit kerja pengawasan tersebut menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada instansi di Provinsi atau Direktur Jenderal.

## **Pasal 5**

- (1). Laporan unit pengawasan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2). Laporan unit pengawasan ketenagakerjaan Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 6**

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam keputusan skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi PPTKIS selama menjalani skorsing.
- (3). Dalam hal masa telah berakhir dan PPTKIS belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut SIPPTKI.

**Pasal 7**

(1). Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Mei 2005

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**FAHMI IDRIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum,**

**Myra M. Hanartani**  
**NIP. 160.025.858**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K1

NO	JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH											PPNS	JUMLAH	KETERANGAN		
		UMUM	SPESIALIS														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
1.	Terampil 1. Pelaksana 2. Pelaksana Lanj 3. Penyelia																
2.	Ahli 1. Pertama 2. Muda 3. Madya																
<b>Jumlah</b>																	

Keterangan Kolom Spesialis

- 1 = Pesawat Uap, Bejana Tekan
- 2 = Pesawat Angkat Angkut
- 3 = Pesawat Tenaga dan Produksi
- 4 = Instalasi Listrik, Lift
- 5 = Penanggulangan Kebakaran
- 6 = Konstruksi Bangunan
- 7 = Kesehatan Kerja
- 8 = Lingkungan Kerja
- 9 = Jamsostek
- 10 = Pengupahan dan Waktu Kerja

(Wilayah/Daerah Tanggal Bulan Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

(.....)

DATA OBYEK PENGAWASAN

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K2

NO	Sektor /KLUI	Jml Perush	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Status Perusahaan				PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL				PENGHARGAAN K3 YG DIM'LIKI PERUSH.
			WNI	WNA	Kecil	Sedang	Besar	Swasta	PMDN	PMA	JOINT VENT	PP	PKB	SP	Lem Triprt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	0															
JUMLAH																

Keterangan :

- 1 = Nomor Urut
- 2 = KLUI 1 s/d 0
- 3 = Jumlah Perusahaan
- 4 = Jumlah TK WNI
- 5 = Jumlah TK WNA
- 6 = Kategori Perusahaan Kecil
- 7 = Kategori Perusahaan Sedang
- 8 = Kategori Perusahaan Besar
- 9 = Status Perusahaan Swasta
- 10 = Status Perusahaan PMDN
- 11 = Status Perusahaan PMA
- 12 = Status Perusahaan Joint Venture
- 13 = Perangkat Hub Industrial (PP)

- 14 = Perangkat Hub Industrial (PKB)
- 15 = Perangkat Hub Industrial (SP)
- 16 = Perangkat Hubungan Industrial (lembaga tripartite)
- 17 = Penghargaan K3 yang dimiliki perusahaan

(Wilayah/Daerah Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

( ..... )

**OBJEK PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(K3)**

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K3

No	Sektor/ KLUI	Pesawat Uap	Bejana Bertekanan	Pesawat Angkat Angkut	Pesawat Tenaga & Produksi	Kelistrikan	Pencegahan Kebakaran	Kesehatan Kerja	Konstruksi Bangunan	Lingkungan Kerja	Sarana K3	Operator/Teknisi/P etugas	Pers. Jasa K3	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
0														

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.....

( ..... )

DATA JAMSOSTEK

TR/WILAYAH :  
 TAHUN :  
 KAB./KOTA :  
 Kode : K4

NO	SEKTOR/ KLUI	JUMLAH PERUSAHAAN		JUMLAH TK				PROGRAM TERDAFTAR					JPK LEBIH BAIK			KET
		WAJIB	TERDAFTAR	WAJIB		TERDAFTAR		JKK	JKM	JHT	JPK		JUMLAH	LAJANG	KEL	
				WNI	WNA	WNI	WNA				LAJANG	KEL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	0															

(Wilayah/Daerah, Tanggal - Bulan - Tahun)

- Keterangan :
1. JKK = Jaminan Kecelakaan Kerja
  2. JKM = Jaminan Kematian
  3. JHT = Jaminan Hari Tua
  4. JPK = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota .....

[.....]

**KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN**

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K5

NO	DATA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		KEGIATAN PEMERIKSAAN				KEGIATAN PEMBINAAN		KETERANGAN
	JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH	PERTAMA	BERKALA	ULANG	KHUSUS	NP. I	NP. II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terampil								
2.	Ahli								
	<b>Jumlah</b>								

Keterangan :

- 1. NP I = Nota Pemeriksaan I
- 2. NP II = Nota Pemeriksaan II

( ..... )  
 (Wilayah/Daerah, Tanggal - Bulan - Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

( ..... )



### KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN

Triwulan  
Tahun  
Kab./Kota  
Kode : KB

NO	JABATAN PENGAWAS	JUMLAH	PERTAMA									BERKALA									ULANG									N. KEY	N. K3	NP. I	NP. II	KET	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.	Perfama																																		
2.	Muda																																		
3.	Madya																																		
	Jumlah																																		

(  
Wilayah/Daerah Tanggal - Bulan - Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

[.....]

DATA PENERBITAN PERIJINAN K3

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K7

NO	SEKTOR/KLUI	JUMLAH PENERBITAN IJIN K3											Ket.
		Pes. Uap	Bejana Tekan	PAA	PTP	LISTRIK	PETIR	KB	Klinik Persh./Poly. Kes. K	Pengdl. Pestisida	Catering Makanan TK	Lain-lain	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
JUMLAH													

Keterangan

- 1 Pes. Uap = Pesawat Uap
- 2 PAA = Pesawat Angkat Angkut
- 3 PTP = Pesawat Tenaga dan Produksi
- 4 KB = Konstruksi Bangunan

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota .....

{ ..... }

**DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA**

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K8a

NO	Sektor/ KLUI	Jml Kecl.	Jml Korban	Keracunan	PAK	TIPE KECELAKAAN KERJA									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	<b>JUMLAH</b>														

- A : Terbentur (pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk dll)
- B : Terpukul (pada umumnya karena jatuh, meluncur, melayang, bergerak, dll)
- C : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam dll)
- D : Jatuh karena ketinggian yang sama
- E : Jatuh karena ketinggian yang berbeda
- F : Tergelincir
- G : Terpapar (pada umumnya berhubungan dengan temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya dll)
- H : Penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat berbahaya kedalam tubuh baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas dll)
- I : Tersentuh aliran listrik
- J : Dan lain-lain

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketonagakerjaan  
 Kab./Kota .....

(.....)

DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K8b

NO	Sektor/K LUI	SUMBER KECELAKAAN KERJA																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1																		
	2																		
	3																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	JUMLAH																		

Keterangan

- A Mesin (mesin pons, mesin pres, gergaji, mesin bor, mesin tenun dll)
- B Penggerak mula dan pompa (motor bakar, pompa angin/kompresor, pompa air, kipas angin Penghisap udara dll)
- C Lift
- D Pesawat Angkut
- E Conveyer
- F Pesawat Angkut
- G Alat Transmisi mekanik (rantai, pulley dll)
- H Perkakas kerja tangan
- I Pesawat Uap dan bejana tekan
- J Peralatan Listrik
- K Bahan Kimia
- L Debu berbahaya
- M Radiasi dan bahan radio aktif
- N Faktor lingkungan (aklim kerja, tekanan udara, getaran, bising, cahaya dll)
- O Bahan mudah terbakar dan benda panas (lak, Film, minyak, kertas, kapak, nap dll)
- P Binatang
- Q Perumahan lantai kerja
- R Lain-lain

(Wilayah/ Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan  
 Prov./Kab./Kota .....

(.....)

DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K8c

No	Sektor/ KLUI	Jml Kasus		Akibat Kecelakaan Kerja				Santunan Yang Dibayarkan		Kerg Matri	Hr Hlg	Lain2	Ket
		KK	PAK	Sembuh	STMB	Cacad	MD	Berkala	Sekaligus				
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
<b>JUMLAH</b>													

Keterangan

- 1. KK = Kecelakaan Kerja
- 2. PAK = Penyakit Akibat Kerja
- 3. STMB = Sementara Tidak Mampu Bekerja
- 4. MD = Meninggal Dunia

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

DATA PELANGGARAN NORMA KERJA

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K9a

No	Sektor KLUI	Jml Prsh Melanggr	Jml Perush di Nota	Jenis Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan																	Ket
				WLK	WKWI	TKA	TKI	UMP	Upah Lemb	THR	Cuti Tahun	Cuti Haid	PP/PKB	P4D/P4P	PWBD	PDS TK	PDS Upah	PDS Prog	Persh Menggk luran	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1																				
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
JUMLAH																					

- Ket :
- 1. WLK : Wajib Lapo Ketenagakerjaan
  - 2. WKWI : Waktu Kerja Waktu Istirahat
  - 3. TKA : Tenaga Kerja Asing
  - 4. TKI : Tenaga Kerja Indonesia
  - 5. UMP : Upah Minimum Provinsi
  - 6. THR : Tunjangan Hari Raya
  - 7. PP/PKB : Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
  - 8. P4D/P4P : Pelaksanaan Putusan P4D/P4P
  - 9. PWBD : Perusahaan Wajib Daftar
  - 10. PDSTK : Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja
  - 11. PDS Upah : Perusahaan Daftar Sebagian Upah
  - 12. PDS Prog : Perusahaan Daftar Sebagian Program

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

(.....)

DATA PELANGGARAN NORMA K3

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab/Kota :  
 kode : K9b

No.	Sektor KLUJ	Jenis Pelanggaran Norma K3													Keterangan	
		P2K3	Ahli K3	PJK3	Klinik Perseh / Pely. Kes.K	Katering Pengelola Makanan	Pengl. Pestisida	Operator / Teknisi / Petugas	Dokter Perseh	Paramedis Perusahaan	Dokter PKTK	Pemeriksaan Kesehatan TK				Lain-lain
												Awal	Berkala	Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
Jumlah :																

(Wilayah/Daerah Tanggal Bulan Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

DATA PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K10

No	Sektor/KLUI	Jml Prsh Melanggar	Jml Persh. Diajukan BAP	Penghentian Penyidikan	PUTUSAN		Ket
					Denda	Kurung	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
JUMLAH							

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 25 Mei 2005

.....  
 (Wilayah/Deerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

MENTERI  
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA,

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan, Kab./Kota .....

ttd.

FAHMI IDRIS

(.....)





DATA PELAKSANAAN PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN

Triwulan :  
Tahun :  
Provinsi :

No	KAB./KOTA	Sektor/KLUI	Jml Prsh Melanggar	Jml Persh. Diajukan BAP	Penghentian Penyidikan	PUTUSAN		Ket
						Denda	Kurung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		JUMLAH						

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Mei 2005

( ..... )  
(Wilayah/Deerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA INSTANSI ATAU KEPALA UNIT PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN, PROV. ....

ttd

FAHMI IDRIS

( ..... )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K1

NO	JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH											PPNS	JUMLAH	KETERANGAN		
		UMUM	SPESIALIS														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
1.	Terampil 1. Pelaksana 2. Pelaksana Lanj 3. Penyelia																
2.	Ahli 1. Pertama 2. Muda 3. Madya																
<b>Jumlah</b>																	

Keterangan Kolom Spesialis

- 1 = Pesawat Uap, Bejana Tekan
- 2 = Pesawat Angkat Angkut
- 3 = Pesawat Tenaga dan Produksi
- 4 = Instalasi Listrik, Lift
- 5 = Penanggulangan Kebakaran
- 6 = Konstruksi Bangunan
- 7 = Kesehatan Kerja
- 8 = Lingkungan Kerja
- 9 = Jamsostek
- 10 = Pengupahan dan Waktu Kerja

(Wilayah/Daerah Tanggal Bulan Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

(.....)

DATA OBYEK PENGAWASAN

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K2

NO	Sektor /KLUI	Jml Perush	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Status Perusahaan				PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL				PENGHARGAAN K3 YG DIM'LIKI PERUSH.
			WNI	WNA	Kecil	Sedang	Besar	Swasta	PMDN	PMA	JOINT VENT	PP	PKB	SP	Lem Triprt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	0															
JUMLAH																

Keterangan :

- 1 = Nomor Urut
- 2 = KLUI 1 s/d 0
- 3 = Jumlah Perusahaan
- 4 = Jumlah TK WNI
- 5 = Jumlah TK WNA
- 6 = Kategori Perusahaan Kecil
- 7 = Kategori Perusahaan Sedang
- 8 = Kategori Perusahaan Besar
- 9 = Status Perusahaan Swasta
- 10 = Status Perusahaan PMDN
- 11 = Status Perusahaan PMA
- 12 = Status Perusahaan Joint Venture
- 13 = Perangkat Hub Industrial (PP)

- 14 = Perangkat Hub Industrial (PKB)
- 15 = Perangkat Hub Industrial (SP)
- 16 = Perangkat Hubungan Industrial (lembaga tripartite)
- 17 = Penghargaan K3 yang dimiliki perusahaan

(Wilayah/Daerah Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

( ..... )

**OBJEK PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(K3)**

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K3

No	Sektor/ KLUI	Pesawat Uap	Bejana Bertekanan	Pesawat Angkat Angkut	Pesawat Tenaga & Produksi	Kelistrikan	Pencegahan Kebakaran	Kesehatan Kerja	Konstruksi Bangunan	Lingkungan Kerja	Sarana K3	Operator/Teknisi/P etugas	Pers. Jasa K3	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
0														

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.....

( ..... )

DATA JAMSOSTEK

TR/WILAYAH :  
 TAHUN :  
 KAB./KOTA :  
 Kode : K4

NO	SEKTOR/ KLUI	JUMLAH PERUSAHAAN		JUMLAH TK				PROGRAM TERDAFTAR					JPK LEBIH BAIK			KET
		WAJIB	TERDAFTAR	WAJIB		TERDAFTAR		JKK	JKM	JHT	JPK		JUMLAH	LAJANG	KEL	
				WNI	WNA	WNI	WNA				LAJANG	KEL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	0															

(Wilayah/Daerah, Tanggal - Bulan - Tahun)

- Keterangan :
1. JKK = Jaminan Kecelakaan Kerja
  2. JKM = Jaminan Kematian
  3. JHT = Jaminan Hari Tua
  4. JPK = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota .....

[.....]

**KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN**

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K5

NO	DATA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		KEGIATAN PEMERIKSAAN				KEGIATAN PEMBINAAN		KETERANGAN
	JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH	PERTAMA	BERKALA	ULANG	KHUSUS	NP. I	NP. II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terampil								
2.	Ahli								
	<b>Jumlah</b>								

Keterangan :

- 1. NP I = Nota Pemeriksaan I
- 2. NP II = Nota Pemeriksaan II

( ..... )  
 (Wilayah/Daerah, Tanggal - Bulan - Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

( ..... )

KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN

Triwulan  
Tahun  
Kab./Kota  
Kode : KB

NO	JABATAN PENGAWAS	JUMLAH	PERTAMA									BERKALA									ULANG									N. KEY	N. K3	NP. I	NP. II	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1.	Perfama																																	
2.	Muda																																	
3.	Madya																																	
	Jumlah																																	

(Wilayah/daerah Tanggal - Bulan - Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

[ .....

DATA PENERBITAN PERIJINAN K3

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K7

NO	SEKTOR/KLUI	JUMLAH PENERBITAN IJIN K3											Ket.
		Pes. Uap	Bejana Tekan	PAA	PTP	LISTRIK	PETIR	KB	Klinik Persh./Poly. Kes. K	Pengdi. Pestisida	Catering Makanan TK	Lain-lain	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
JUMLAH													

Keterangan

- 1 Pes. Uap = Pesawat Uap
- 2 PAA = Pesawat Angkat Angkut
- 3 PTP = Pesawat Tenaga dan Produksi
- 4 KB = Konstruksi Bangunan

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota .....

{ ..... }



**DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA**

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K8a

NO	Sektor/ KLUI	Jml Kecl.	Jml Korban	Keracunan	PAK	TIPE KECELAKAAN KERJA									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	<b>JUMLAH</b>														

- A : Terbentur (pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk dll)
- B : Terpukul (pada umumnya karena jatuh, meluncur, melayang, bergerak, dll)
- C : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam dll)
- D : Jatuh karena ketinggian yang sama
- E : Jatuh karena ketinggian yang berbeda
- F : Tergelincir
- G : Terpapar (pada umumnya berhubungan dengan temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya dll)
- H : Penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat berbahaya kedalam tubuh baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas dll)
- I : Tersentuh aliran listrik
- J : Dan lain-lain

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketonagakerjaan  
 Kab./Kota .....

(.....)

DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K8b

NO	Sektor/K LUI	SUMBER KECELAKAAN KERJA																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1																		
	2																		
	3																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	JUMLAH																		

- Keterangan:
- A : Mesin (mesin pots, mesin pres, gergaji, mesin bor, mesin tenun dll)
  - B : Penggerak mula dan pompa (motor bakar, pompa angin/kompresor, pompa air, kipas angin Penghisap udara dll)
  - C : Lift
  - D : Pesawat Angkut
  - E : Conveyer
  - F : Pesawat Angkut
  - G : Alat Transmisi mekanik (rantai, pulley dll)
  - H : Perkakas kerja tangan
  - I : Pesawat Uap dan bejana tekan
  - J : Peralatan Listrik
  - K : Bahan Kimia
  - L : Debu berbahaya
  - M : Radiasi dan bahan radio aktif
  - N : Faktor lingkungan (aklim kerja, tekanan udara, getaran, bising, cahaya dll)
  - O : Bahan mudah terbakar dan benda panas (lak, Film, minyak, kertas, kapuk, nap dll)
  - P : Binatang
  - Q : Perumahan lantai kerja
  - R : Lain-lain

(Wilayah/ Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan  
 Prov./Kab./Kota .....

(.....)

DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K8c

No	Sektor/ KLUI	Jml Kasus		Akibat Kecelakaan Kerja				Santunan Yang Dibayarkan		Kerg Matri	Hr Hlg	Lain2	Ket
		KK	PAK	Sembuh	STMB	Cacad	MD	Berkala	Sekaligus				
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
<b>JUMLAH</b>													

Keterangan

- 1. KK = Kecelakaan Kerja
- 2. PAK = Penyakit Akibat Kerja
- 3. STMB = Sementara Tidak Mampu Bekerja
- 4. MD = Meninggal Dunia

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

DATA PELANGGARAN NORMA KERJA

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K9a

No	Sektor KLUI	Jml Prsh Melanggr	Jml Perush di Nota	Jenis Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan																	Ket
				WLK	WKWI	TKA	TKI	UMP	Upah Lemb	THR	Cuti Tahun	Cuti Haid	PP/PKB	P4D/P4P	PWBD	PDS TK	PDS Upah	PDS Prog	Persh Menggk luran	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1																				
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
JUMLAH																					

- Ket :
- 1. WLK : Wajib Lapo Ketenagakerjaan
  - 2. WKWI : Waktu Kerja Waktu Istirahat
  - 3. TKA : Tenaga Kerja Asing
  - 4. TKI : Tenaga Kerja Indonesia
  - 5. UMP : Upah Minimum Provinsi
  - 6. THR : Tunjangan Hari Raya
  - 7. PP/PKB : Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
  - 8. P4D/P4P : Pelaksanaan Putusan P4D/P4P
  - 9. PWBD : Perusahaan Wajib Daftar
  - 10. PDSTK : Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja
  - 11. PDS Upah : Perusahaan Daftar Sebagian Upah
  - 12. PDS Prog : Perusahaan Daftar Sebagian Program

(Wilayah/Daerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

(.....)

DATA PELANGGARAN NORMA K3

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab/Kota :  
 kode : K9b

No.	Sektor KLUI	Jenis Pelanggaran Norma K3														Keterangan
		P2K3	Ahli K3	PJK3	Klinik Perseh / Pely. Kes.K	Katering Pengelola Makanan	Pengl. Pestisida	Operator / Teknisi / Petugas	Dokter Perseh	Paramedis Perusahaan	Dokter PKTK	Pemeriksaan Kesehatan TK			Lain-lain	
												Awal	Berkala	Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
Jumlah :																

(Wilayah/Daerah Tanggal Bulan Tahun)

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan Kab./Kota .....

DATA PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN

Triwulan :  
 Tahun :  
 Kab./Kota :  
 Kode : K10

No	Sektor/KLUI	Jml Prsh Melanggar	Jml Persh. Diajukan BAP	Penghentian Penyidikan	PUTUSAN		Ket
					Denda	Kurung	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
JUMLAH							

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 25 Mei 2005

.....  
 (Wilayah/Deerah, Tanggal, Bulan, Tahun)

MENTERI  
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA,

Kepala Instansi atau Kepala Unit Kerja Pengawasan  
 Ketenagakerjaan, Kab./Kota .....

ttd.

FAHMI IDRIS

(.....)

